

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana hampir seluruh penduduk Indonesia mengandalkan sektor pertanian terhadap mata pencahariannya. Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini dikarenakan sektor pertanian berfungsi sebagai basis atau landasan pembangunan ekonomi. Keadaan seperti ini menuntut kebijakan pemerintah pada sektor pertanian disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi di lapangan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan bangsa, Tambunan dalam M. Yamin (2005).

Seiring berkembangnya zaman, sektor pertanian sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke sektor non pertanian seperti sektor industri dan sektor jasa. Sektor pertanian di Indonesia kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah ,mulai dari subsidi, kredit, perlindungan sampai kepada kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Di banyak negara sektor pertanian merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor non pertanian misalnya sektor industri, karena output yang dihasilkan dari sektor pertanian merupakan pasokan bahan baku untuk keperluan kegiatan produksi di sektor-sektor non pertanian. Selain itu jika melihat kondisi di saat krisis tahun 1998 maka hanya sektor pertanian satu-satunya sektor yang mampu bertahan dan memiliki pertumbuhan positif serta masih mampu menyerap tenaga kerja, maka dari itu sudah seharusnya sektor pertanian ditempatkan pada posisi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapat kondisi yang lebih baik. Menurut Arsyad (2004) pembangunan daerah dapat diartikan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada untuk membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam merangsang perkembangan kegiatan ekonomi.

Proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah merupakan suatu proses pembangunan yang menyeimbangkan antara pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan nasional dilakukan untuk menunjang dan mendorong berkembangnya pembangunan daerah dan di lain pihak pembangunan daerah ditingkatkan untuk memperkuat pembangunan nasional dan struktur perekonomian secara nasional yang mantap dan dinamis (Adisasmita, 2013:22).

Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan tidak sama. Misalnya wilayah pantai yang masyarakatnya umumnya para nelayan akan memerlukan kebijakan pembangunan yang berbeda dengan masyarakat daerah dataran tinggi yang banyak bergerak dalam usaha perkebunan, ataupun daerah perkotaan yang banyak bergerak pada sektor perdagangan jasa dan industri yang berbeda dengan daerah kabupaten yang didominasi oleh sektor pertanian (Todaro, 2009:48). Pembangunan nasional maupun daerah tidak terlepas dari pembangunan di sektor pertanian.

Pembangunan pertanian dianggap penting dalam pembangunan nasional karena pembangunan pertanian memiliki potensi yang cukup besar terkait dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Menurut Jhingan (2000) terdapat beberapa bentuk kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan dan pembangunan nasional yaitu: (1) menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat, (2) meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier, (3) menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian secara terus-menerus, dan (4) memperbaiki kesejahteraan penduduk desa.

Pranadji (1995), menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan leading sektor bagi perekonomian nasional karena pada sektor ini memiliki ciri-ciri: (1) tangguh, yang berarti unggul dalam persaingan, mampu menghadapi gejolak ekonomi dan politik, mampu mengatasi goncangan internal dan eksternal serta memiliki stabilitas yang tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai penopang bagi perekonomian, (2) progresif,

yang berarti dapat tumbuh positif secara berkelanjutan tanpa menimbulkan efek negatif terhadap kualitas lingkungan hidup, dan (3) dominan, yang berarti merupakan sektor andalan yang diukur dengan volume produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar.

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mempercepat pembangunan suatu daerah adalah pengembangan wilayah dengan menetapkan pusat pertumbuhan. Ditengah-tengah keterbatasan biaya untuk melaksanakan pembangunan, melalui penetapan pusat pertumbuhan maka pemerintah dapat lebih fokus untuk membangun daerah tersebut yang nantinya daerah pusat pertumbuhan itu akan memberikan efek yang menguntungkan kepada daerah belakangnya (Nainggolan, 2010:14).

Pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun ke luar (wilayah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik, yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut

Menurut Gultom (2013) penerapan konsep wilayah pembangunan merupakan sebuah media untuk merumuskan strategi kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Konsep ini menetapkan wilayah tertentu sebagai pusat pembangunan dan wilayah lain sebagai satelitnya. Penerapan wilayah pembangunan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah yang berbeda-beda untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Menurut Tarigan (2007) Faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi regional adalah Keuntungan lokasi, aglomerasi migrasi, dan arus lalu lintas modal antarwilayah.

B. Rumusan Masalah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah mewacanakan rencana pengembangan kawasan metropolitan yaitu Bukittinggi-Agam-Payakumbuh-Lima Puluh Kota-Padang Panjang-Tanah Datar yang disingkat dengan BUKAPALIPATAR.

Pada kawasan Metropolitan Bukapalipatar akan dibangun jalan tol Pekanbaru-Bengkinang-Payakumbuh-Bukittinggi sepanjang 185 KM dan jalan tol Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang sepanjang 55 KM yang saat ini sedang dikaji. Tentunya dalam wacana program pengembangan kawasan metropolitan ini akan berdampak kepada pembangunan pertanian. Sektor pertanian dapat mengambil keuntungan dalam wacana program ini untuk memajukan sektor pertanian supaya lebih berkembang lagi.

Dari keenam daerah tersebut, Kota Bukittinggi direncanakan sebagai pusat dari pembangunan kawasan metropolitan. Pemerintah menyebutkan Bukittinggi sudah memiliki modal untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan karena merupakan daerah tujuan wisata dan perdagangan. Namun dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dan merumuskan pusat pertumbuhan pada sektor pertanian dalam wacana program pembangunan kawasan agropolitan di wilayah Bukapalipatar.

Enam kabupaten dan kota ini akan saling dukung untuk mewujudkan pembangunan terpadu kawasan. Pada tahap awal program pembangunan tersebut akan difokuskan pada infrastruktur yang saling tersambung dan menunjang antara masing-masing kabupaten dan kota. Selanjutnya, akan diteruskan pada program lain seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dalam mengukur perkembangan pembangunan suatu daerah dari berbagai lapangan usaha maupun untuk melihat karakteristik penyebaran perekonomian suatu daerah. Begitu juga halnya untuk keenam daerah Bukapalipatar, tiga daerah yaitu Lima Puluh Kota, Agam dan Tanah Datar peranan terbesar masih pada sektor pertanian, sedangkan tiga daerah lainnya seperti Bukittinggi, Padang Panjang dan Payakumbuh peranan terbesar PDRB nya terdapat pada sektor Perdagangan besar. Jika dilihat dari kontribusi

sektor pertanian tersebut terhadap nilai total PDRB di wilayah Bukapalipatar pada tahun 2016, daerah tertinggi yang memiliki PDRB Atas Dasar Harga Konstan yaitu kabupaten Agam dengan nilai Rp. 3.909.088,3 (jutaan) dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mencapai 3,54 persen. Sedangkan wilayah dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan terendah yang berada pada wilayah Bukapalipatar adalah Bukittinggi dengan nilai Rp. 67.922,8 (jutaan) dan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebesar 1,80 persen (Lampiran 8).

Perbedaan PRDB dan pertumbuhan PDRB seperti ini dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan antarwilayah, hal tersebut antara lain karena kegiatan perekonomian cenderung berorientasi di wilayah – wilayah. Menurut Tambunan (2009) salah satu indikator yang dapat digunakan dalam melihat ketimpangan antarwilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan indikator tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah di wilayah Bukapalipatar, di mana perekonomian khususnya sektor pertanian bertumpu pada beberapa wilayah saja. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut memiliki kontribusi terhadap PDRB yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Todaro (2006) juga menyebutkan, salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah yaitu dengan menggunakan PDRB per kapita. PDRB per kapita yang semakin besar menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Selain dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan tersebut, perlu dicermati apakah PDRB per kapita tersebut sudah terdistribusi secara merata atau tidak.

Berangkat dari hal tersebut, maka Kota dan Kabupaten yang ada pada wilayah Bukapalipatar dinilai perlu diidentifikasi untuk dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Sehingga diharapkan dengan keberadaan pusat-pusat pertumbuhan yang baru, hasil pembangunan sektor pertanian serta ekonominya mempunyai efek menyebar dan terjadi pemerataan di setiap wilayah. Hingga saat ini belum ada kajian akademis mengenai potensi wilayah Bukapalipatar sebagai pusat pertumbuhan sektor pertanian dalam pembangunan kaawasan Agropolitan. Cakupan ruang lingkup kota

dan kabupaten sebagai pusat pertumbuhan sektor pertanian dimaksudkan agar pemerataan pembangunan antarwilayah Bukapalipatar dapat lebih merata.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah:

1. Wilayah manakah yang dapat menjadi pusat pertumbuhan sektor pertanian dalam program pengembangan kawasan agropolitan pada kawasan Bukapalipatar di Sumatera Barat?
2. Bagaimana interaksi antara pusat pertumbuhan sektor pertanian dengan wilayah sekitarnya (*hinterland*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wilayah manakah yang dapat menjadi pusat pertumbuhan sektor pertanian dalam program pengembangan kawasan agropolitan pada kawasan Bukapalipatar di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui interaksi antara pusat pertumbuhan sektor pertanian dengan wilayah sekitarnya (*hinterland*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada :

1. Pengambil Kebijakan.

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kondisi kota Bukitinggi sehingga dapat memahami lebih jauh untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Ilmu Pengetahuan.

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini melengkapi kajian tentang pusat pertumbuhan ekonomi, serta sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.